

SISTEM EKONOMI DAN POLITIK EKONOMI : PENGERTIAN SYSTEM EKONOMI DAN RUANG LINGKUP SYSTEM EKONOMI

Fitria Novita Sari

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Darul Ulum
Lamongan

Fitrianovita.2022@mhs.unisda.ac.id

Abstract

An economic system refers to the methods used by a country or society to organize and manage economic activities, including the production, distribution, and consumption of goods and services. Economic systems can be differentiated based on the government's role in regulating the economy, which includes market economic systems, centralized (command) economic systems, and mixed economic systems. Meanwhile, political economics is a branch of science that studies the relationship between economic policies and political factors, as well as how political decisions affect a country's economy. The scope of the economic system includes various aspects such as resource allocation, income distribution, as well as the formation and implementation of economic policies that influence the welfare of society. In relation to political economy, the economic system also includes analysis of the role of the state, fiscal, monetary and international relations policies that influence the global economy.

Keywords: *Economic System, Political Economy, Market Economic System, Centralized Economic System, Mixed Economic System, Economic Policy, Resource Allocation, Community Welfare*

Abstrak

Sistem ekonomi merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengatur dan mengelola kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Sistem ekonomi dapat dibedakan berdasarkan peran pemerintah dalam mengatur perekonomian, yang meliputi sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat (komando), dan sistem ekonomi campuran. Sementara itu, politik ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara kebijakan ekonomi dan faktor-faktor politik, serta bagaimana keputusan politik memengaruhi perekonomian suatu negara. Ruang lingkup sistem ekonomi mencakup berbagai aspek seperti alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, serta pembentukan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan politik ekonomi, sistem ekonomi juga mencakup analisis terhadap peran negara, kebijakan fiskal, moneter, dan hubungan internasional yang berpengaruh pada perekonomian global.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi, Politik Ekonomi, Sistem Ekonomi Pasar, Sistem Ekonomi Terpusat, Sistem Ekonomi Campuran, Kebijakan Ekonomi, Alokasi Sumber Daya, Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi dan politik ekonomi adalah dua konsep yang memiliki peran fundamental dalam mengatur dan mengelola perekonomian suatu negara atau masyarakat. Sistem ekonomi merujuk pada cara-cara yang digunakan oleh suatu negara untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Ini mencakup mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa, yang bisa berbeda-beda tergantung pada sistem yang diterapkan, seperti kapitalisme, sosialisme, atau ekonomi campuran (Pratiwi 2021).¹ Sistem ekonomi bukan hanya berkaitan dengan aliran barang dan jasa, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengelola faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Setiap sistem ekonomi memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda yang memengaruhi cara negara mengatur aktivitas ekonomi, serta distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial.

Di sisi lain, politik ekonomi berfokus pada hubungan antara kebijakan politik dan sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara (Suleman, Parenrengi, and Oelfa 2021).² Kebijakan pemerintah yang diambil dalam bidang fiskal, moneter, perdagangan, dan sektor lainnya akan memengaruhi cara sistem ekonomi dijalankan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan politik memengaruhi pengelolaan ekonomi, serta bagaimana keputusan-keputusan politik tersebut dapat mendukung atau merintangai tujuan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, politik ekonomi juga mempengaruhi bagaimana negara mengatur dan mengawasi sektor publik dan swasta, serta menjaga keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang pengertian sistem ekonomi, serta ruang lingkupnya yang mencakup berbagai aspek pengelolaan perekonomian. Melalui pemahaman ini, diharapkan pembaca dapat lebih memahami bagaimana berbagai sistem ekonomi beroperasi, serta bagaimana kebijakan politik yang tepat dapat memengaruhi arah dan keberlanjutan ekonomi. Dengan memahami sistem ekonomi secara lebih komprehensif, kita dapat melihat hubungan yang erat antara kebijakan pemerintah dan pencapaian tujuan sosial-ekonomi dalam masyarakat (Al Insany and Fauzi 2019).³

DEFINISI SISTEM EKONOMI

¹ Pratiwi, Ayu. 2021. "Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik Dalam Pembangunan Di Indonesia." *Abiwarra : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis* 3(1): 1–14. doi:10.31334/abiwara.v3i1.1847. {Formatting Citation }

² Suleman, Nenden Herawaty, Ferdiansyah Parenrengi, and Tirta Kurniawan Oelfa. 2021. "Ekonomi Politik Indonesia Saat Ini, Kebijakan, Penerapan Serta Tanggapan Masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado." *Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1(1): 28. doi:10.30984/ajiel.v1i1.1509.

³ Al Insany, Muhammad Alif, and R. Moh. Qudsi Fauzi. 2019. "The Concept of Political Economy in the Perspective of Ibn Khaldun." *Journal of Theoretical and Applied Islamic Economics* 6(1): 154–69.

Sistem ekonomi adalah cara atau metode yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengorganisir, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dalam sistem ekonomi, terdapat berbagai keputusan penting yang harus diambil, seperti siapa yang akan memproduksi barang dan jasa, bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang dan jasa tersebut akan didistribusikan(Nurullah 2016).⁴ Oleh karena itu, sistem ekonomi menjadi kerangka dasar yang mengatur segala aktivitas ekonomi dalam suatu negara, dari proses produksi hingga konsumsi oleh individu atau rumah tangga.

Secara umum, sistem ekonomi bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan optimal. Karena sumber daya selalu terbatas, maka penting untuk memutuskan bagaimana cara terbaik dalam memanfaatkan sumber daya tersebut, serta mengatur distribusi barang dan jasa. Beberapa contoh keputusan dalam sistem ekonomi meliputi jenis barang yang akan diproduksi, teknologi yang digunakan dalam produksi, dan cara barang dipasarkan dan dikonsumsi. Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan sistem ekonomi yang diterapkan, yang akan sangat dipengaruhi oleh ideologi politik yang dianut(Hadi 2018).⁵

Terdapat berbagai jenis sistem ekonomi yang diterapkan di dunia, termasuk sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi terpusat (sosialis), dan sistem ekonomi campuran(Wijayanto et al. n.d.).⁶ Sistem ekonomi pasar mengutamakan peran pasar bebas dalam menentukan harga dan distribusi barang, sedangkan sistem ekonomi terpusat memberi peran besar kepada negara dalam mengatur seluruh aspek ekonomi. Sistem ekonomi campuran, yang banyak diterapkan oleh negara-negara modern, menggabungkan elemen pasar bebas dengan intervensi pemerintah untuk mengatur sektor-sektor tertentu demi mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, sistem ekonomi berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dalam perekonomian, memastikan ketersediaan barang dan jasa yang cukup, serta meminimalisir ketimpangan dalam distribusinya.

JENIS-JENIS

Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang umumnya berkembang di masyarakat yang masih sederhana dan bergantung pada kegiatan pertanian atau perburuan untuk memenuhi kebutuhan hidup(Rahardjo 2009).⁷ Dalam sistem ini, produksi, distribusi, dan konsumsi barang

⁴ Nurullah. 2016. "Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia." *sistem ekonomi dan demokrasi Hikamuna I Edisi* 1(1): 16.

⁵ Hadi, Nur. 2018. "Paradigma Idiologi Sistem Ekonomi Dunia." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 17(1): 97. doi:10.24014/af.v17i1.4769.

⁶ Wijayanto, Baskoro, Ekonomi Konvensional, Etika Ekonomi, and Islamic World View. "ISLAMIC WORLD VIEW : PERBANDINGAN." : 112–25.

⁷ Rahardjo, M. Dawam. 2009. "Menuju Sistem Perekonomian Indonesia." *Unisia* 32(72): 113–28. doi:10.20885/unisia.vol32.iss72.art1.

dan jasa dilakukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang sudah ada sejak lama. Kegiatan ekonomi umumnya berlangsung dalam skala kecil, dengan penggunaan teknologi yang terbatas, serta mengandalkan sistem barter atau pertukaran barang untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Sistem ini mengutamakan kestabilan dan keberlanjutan, namun tidak memungkinkan adanya pengembangan yang cepat dalam hal produksi atau diversifikasi ekonomi.

Sistem ekonomi terpusat (komando) adalah sistem yang diatur sepenuhnya oleh pemerintah(Salam 2016).⁸ Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga harga barang dan jasa. Negara memegang kekuasaan dalam mengatur sumber daya dan menentukan kebijakan ekonomi yang berlaku. Biasanya, sektor-sektor strategis seperti energi, pertanian, dan industri besar dikelola oleh negara. Negara-negara dengan sistem ekonomi terpusat, seperti Korea Utara atau pada masa lalu Uni Soviet, cenderung mengutamakan tujuan kolektif dan kesetaraan sosial, meskipun sering kali mengurangi kebebasan pasar dan inovasi individu.

Sistem ekonomi pasar, di sisi lain, menekankan pada kebebasan individu dalam membuat keputusan ekonomi. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar bebas. Produksi dan distribusi barang serta jasa dilakukan oleh individu atau perusahaan swasta yang berkompetisi untuk memperoleh keuntungan. Harga barang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar, di mana faktor penawaran dan permintaan akan mempengaruhi harga tersebut. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa Barat menganut sistem ekonomi pasar, meskipun seringkali dengan beberapa intervensi pemerintah untuk memastikan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial(Futri et al. 2022).⁹

Sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Dalam sistem ini, sektor swasta bebas menjalankan kegiatan ekonomi dan bersaing di pasar, namun pemerintah tetap memainkan peran penting dalam mengatur beberapa sektor ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mengatur sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta memberikan bantuan atau subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan. Negara-negara seperti Indonesia, Jerman, dan Jepang menggunakan sistem ekonomi campuran untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pasar dan pengaturan pemerintah, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

⁸ Salam, Abdul. 2016. "INTERRELASI ANTARA ETIKA DAN SISTEM EKONOMI (Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1(2): 31. doi:10.21927/jesi.2011.1(2).31-44.

⁹ Putri, Fitria, Mifta Amalia, Dewi Aminah Lestari, and Esavira Yunitasya. 2022. "Analisis Peningkatan Sinergi Antara Pasar Tradisional Dan Modernitas Guna Mencapai Penyeluruhan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 22(2): 150–57. doi:10.30596/ekonomikawan.v22i2.12395.

RUANG LINGKUP

1. Kegiatan Produksi

Definisi Produksi: Produksi adalah proses menciptakan barang dan jasa dengan mengolah sumber daya yang tersedia (Ummah 2019).¹⁰ Dalam sistem ekonomi, kegiatan produksi melibatkan penggunaan berbagai faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam.

Faktor Produksi: Faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa meliputi tanah (sumber daya alam), tenaga kerja (keterampilan dan waktu), modal (peralatan dan uang untuk produksi), serta kewirausahaan (kemampuan untuk mengorganisir dan mengelola proses produksi) (Moonik, Kaunang, and Lolowang 2020).¹¹

Tujuan Produksi: Tujuan utama dari kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia (Nur 2019).¹² Setiap sistem ekonomi memiliki cara berbeda dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk produksi barang dan jasa.

2. Distribusi Barang dan Jasa

Proses Distribusi: Distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa yang telah diproduksi kepada konsumen atau pengguna akhir (Eka Rahayu and Athoillah 2022).¹³ Dalam sistem ekonomi, distribusi dapat dilakukan melalui pasar, lembaga distribusi, atau mekanisme lain yang sesuai dengan jenis sistem ekonomi yang diterapkan.

¹⁰ Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "Produksi." *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹¹ Moonik, Friska Erika, Rine Kaunang, and Tommy Fredy Lolowang. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Padi Sawah Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan." *Agri-Sosioekonomi* 16(1): 69. doi:10.35791/agrsos.16.1.2020.27073.

¹² Nur, Mahfuz. 2019. "Produksi Dalam Islam." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 1(01): 97–119. doi:10.34005/elarbah.v1i01.537.

¹³ Eka Rahayu, Annisa, and Mohamad Anton Athoillah. 2022. "Peran Pasar Dalam Distribusi Sumber Daya Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Iqtisaduna* 8(2): 228–39. doi:10.24252/iqtisaduna.v8i2.33291.

Pasar sebagai Tempat Distribusi: Dalam sistem ekonomi pasar, pasar berperan penting dalam mendistribusikan barang dan jasa. Harga barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang ada di pasar.

Peran Pemerintah dalam Distribusi: Pada sistem ekonomi tertentu, pemerintah dapat turut serta dalam mengatur distribusi barang dan jasa untuk memastikan pemerataan, seperti melalui subsidi atau pengaturan harga untuk barang-barang penting.

3. Konsumsi

Definisi Konsumsi: Konsumsi adalah proses penggunaan barang dan jasa oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Kegiatan konsumsi ini sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan pola konsumsi yang berkembang di masyarakat.

Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi: Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi antara lain tingkat pendapatan masyarakat, harga barang dan jasa, preferensi konsumen, serta kebijakan ekonomi pemerintah yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat (Di and Smart 2016).¹⁴

Peran Konsumen dalam Sistem Ekonomi: Konsumen berperan sebagai penggerak permintaan dalam ekonomi. Permintaan ini akan mempengaruhi keputusan produksi dan distribusi oleh produsen dan pasar.

4. Peran Pemerintah dalam Sistem Ekonomi

Kebijakan Ekonomi: Pemerintah memiliki peran penting dalam sistem ekonomi melalui pembuatan dan penerapan kebijakan ekonomi (Lc., M.El, 2011).¹⁵ Kebijakan ini dapat mencakup pajak, subsidi, pengaturan harga barang, serta kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Regulasi Pasar dan Pengaturan Distribusi: Pemerintah sering terlibat dalam mengatur pasar untuk memastikan bahwa distribusi barang dan jasa adil, mencegah monopoli, serta melindungi kepentingan konsumen dan produsen. Dalam beberapa sistem ekonomi, pemerintah berperan dalam mendistribusikan barang dan jasa secara langsung (misalnya, di negara dengan sistem ekonomi sosialisme).

¹⁴ Di, Berbelanja, and Home Smart. 2016. "Ramayanti & Safri 2016 (Dalam Kotler, 2007)." 3(1).

¹⁵ Lc., M.El, Misbahul Munir,. 2011. "Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam." *Iqtishoduna* 1(3). doi:10.18860/iq.v1i3.206.

Stabilisasi Ekonomi: Salah satu peran penting pemerintah dalam sistem ekonomi adalah menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang dapat menanggulangi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan ini.

DEFINISI POLITIK

Politik ekonomi merujuk pada studi tentang hubungan antara kebijakan politik dan aktivitas ekonomi dalam suatu negara (Kurnia 2024).¹⁶ Secara umum, politik ekonomi berfokus pada bagaimana keputusan politik mempengaruhi perekonomian dan bagaimana kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah. Konsep ini mengintegrasikan dua bidang utama: politik dan ekonomi, yang sering kali saling terkait dan saling mempengaruhi. Politik ekonomi tidak hanya mempelajari teori-teori ekonomi, tetapi juga bagaimana teori-teori tersebut diterapkan dalam kebijakan nyata yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi suatu negara. Ini termasuk pengelolaan sumber daya, pengaturan pasar, serta peran pemerintah dalam mengintervensi atau membiarkan pasar beroperasi secara bebas.

Di dalam politik ekonomi, salah satu aspek penting yang dipelajari adalah peran pemerintah dalam mengelola dan mengarahkan perekonomian. Pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi melalui berbagai kebijakan, seperti kebijakan fiskal (pengelolaan pajak dan pengeluaran negara), kebijakan moneter (pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga), serta kebijakan perdagangan dan regulasi pasar (Kartika 2024).¹⁷ Politik ekonomi juga mengkaji interaksi antara sektor publik dan sektor swasta dalam perekonomian. Dalam beberapa sistem ekonomi, seperti sosialisme atau komunisme, negara memainkan peran yang sangat besar dalam mengatur dan mengendalikan ekonomi, sementara dalam sistem kapitalisme, peran negara lebih terbatas, dengan pasar bebas yang mendominasi alokasi sumber daya.

Selain itu, politik ekonomi juga berkaitan dengan masalah distribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam politik ekonomi dapat memiliki dampak yang besar terhadap tingkat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, kebijakan subsidi pangan atau bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Dan and Sosial n.d.).¹⁸ Sebaliknya, kebijakan ekonomi yang berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, seperti pemilik modal besar, dapat memperburuk ketimpangan sosial dan memperlebar jurang

¹⁶ Kurnia, Amanda Dwi. 2024. "Peran Politik Dalam Dinamika Ekonomi : Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Pertumbuhan Dan Stabilitas Ekonomi." 1(5): 222–28.

¹⁷ Kartika, R. 2024. "Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia Dari Hambatan Dan Upaya Penanggulangannya." ... *Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and ...* 4(1): 158–70. <http://ijebef.esc-id.org/index.php/home/article/view/146%0Ahttp://ijebef.esc-id.org/index.php/home/article/download/146/125>.

¹⁸ Dan, Kemiskinan, and Kesenjangan Sosial. "71-Article Text-296-1-10-20200830." 2(2): 119–28.

antara kaya dan miskin. Oleh karena itu, politik ekonomi tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan distribusi yang lebih merata dari hasil pembangunan ekonomi.

HUBUNGAN ANTARA SISTEM EKONOMI DAN POLITIK EKONOMI

Sistem ekonomi mengacu pada cara suatu negara mengelola dan mendistribusikan sumber daya untuk menghasilkan, mengkonsumsi, dan mendistribusikan barang dan jasa, sedangkan politik ekonomi berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi sistem ekonomi dan sebaliknya (Mubyarto 2004).¹⁹ Dalam sistem ekonomi pasar, kebijakan politik lebih cenderung mendukung kebijakan yang memfasilitasi pasar bebas dengan meminimalisir intervensi pemerintah. Negara yang menganut sistem ini biasanya mengutamakan kebebasan berbisnis, yang mana kebijakan politiknya akan mendukung deregulasi, privatisasi, dan pengurangan pajak. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi terpusat seperti sosialisme, kebijakan politik lebih banyak mengatur dan mengontrol produksi serta distribusi barang dan jasa oleh negara, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kebijakan politik juga dapat berperan dalam membentuk atau mengubah sistem ekonomi yang ada. Keputusan politik mengenai kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, atau subsidi dapat mempengaruhi struktur ekonomi suatu negara. Misalnya, negara yang mengimplementasikan kebijakan proteksionis dengan menetapkan tarif impor tinggi akan membatasi arus barang asing dan memberikan keuntungan bagi industri dalam negeri. Di sisi lain, negara yang memilih kebijakan perdagangan bebas akan membuka pasar mereka untuk lebih banyak persaingan internasional, yang dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan politik tidak hanya mempengaruhi stabilitas ekonomi jangka pendek, tetapi juga dapat menciptakan perubahan fundamental dalam arah sistem ekonomi yang lebih luas.

Contoh konkret hubungan antara sistem ekonomi dan politik ekonomi dapat dilihat pada beberapa negara dengan sistem ekonomi yang berbeda. Di Amerika Serikat, yang menganut kapitalisme, kebijakan politik lebih mengarah pada kebijakan pasar bebas dengan sedikit campur tangan negara dalam ekonomi. Hal ini terlihat dalam kebijakan yang mendukung privatisasi, deregulasi industri, dan pengurangan pajak untuk perusahaan. Sebaliknya, negara seperti Swedia dengan sistem ekonomi campuran, menggabungkan kebijakan pasar bebas dengan pengaturan sosial yang ketat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Negara ini mengimplementasikan pajak progresif tinggi untuk mendanai layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan gratis bagi warga negara. Di sisi lain, China, yang menerapkan sistem sosialisme dengan elemen pasar, menunjukkan bagaimana kebijakan politik dapat berfokus pada pengaturan ekonomi yang ketat

¹⁹ Mubyarto. 2004. "Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi." *Journal of Indonesian Economy and Business* 19(1): 16–26.

sambil tetap membuka ruang bagi sektor swasta dalam beberapa bidang tertentu(Adiwilaga, Kusumah, and Mustofa 2023).²⁰ Melalui contoh-contoh ini, terlihat jelas bagaimana sistem

ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara akan membentuk kebijakan politik yang diambil, yang pada gilirannya dapat memperkuat atau merubah arah sistem ekonomi itu sendiri.

TANTANGAN DALAM SISTEM EKONOMI DAN POLITIK EKONOMI

Sistem ekonomi dan politik ekonomi menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang semakin lebar. Ketimpangan ini sering terjadi di negara-negara dengan sistem ekonomi pasar bebas, di mana terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan antara kelompok kaya dan miskin. Di banyak negara, kelompok elit yang memiliki akses terhadap modal dan sumber daya dapat mengakumulasi kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar populasi lainnya hidup dalam kondisi kemiskinan atau kesulitan ekonomi. Ketimpangan ini memicu ketidakpuasan sosial, konflik politik, dan berpotensi memperburuk ketegangan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi sosialisme atau campuran, meskipun redistribusi kekayaan lebih ditekankan, tantangan tetap muncul terkait efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan pemerataan sosial dan mengatasi kemiskinan(Ihsani and Rohman 2022).²¹

Selain ketimpangan ekonomi, permasalahan distribusi kekayaan juga menjadi tantangan besar(Untuk et al. 2008).²² Meskipun sebagian besar negara berusaha untuk mencapai pemerataan melalui kebijakan sosial dan redistribusi, keberhasilan dalam hal ini seringkali terbatas. Sistem ekonomi yang mengandalkan pasar bebas sering kali gagal mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan, terutama di negara-negara berkembang. Pada banyak kasus, kebijakan politik yang lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, seperti menarik investasi asing atau mendukung sektor-sektor tertentu, mengabaikan aspek distribusi kekayaan yang lebih merata. Hal ini dapat menyebabkan sebagian besar keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu atau wilayah tertentu, meninggalkan sebagian besar masyarakat tanpa akses yang setara terhadap sumber daya atau peluang ekonomi. Dalam konteks ini, politik ekonomi harus menanggapi tantangan ini dengan kebijakan yang lebih inklusif untuk memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi.

²⁰ Adiwilaga, Rendy, Prasta Kusumah, and MustabsyrotulUmmah Mustofa. 2023. "IMPLIKASI RIVALITAS AMERIKA SERIKAT – REPUBLIK RAKYAT CHINA TERHADAP POSISI KEDAULATAN INDONESIA (Studi Kasus Pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan)." *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 2(1): 29. doi:10.24198/aliansi.v2i1.44641.

²¹ Ihsani, Salim Fauzanul, and M. Fathur Rohman. 2022. "Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, Dan Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi-Qu* 12(1): 1. doi:10.35448/jequ.v12i1.16292.

²² Untuk, Diajukan, Memenuhi Sebagian, Dalam Memperoleh, Gelar Sarjana, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Angela Ratih P, Fakultas Ekonomi, and Universitas Airlangga. 2008. "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 1990-2005." 13(2): 27–40

Dampak globalisasi juga memainkan peran besar dalam tantangan yang dihadapi sistem ekonomi dan politik ekonomi saat ini. Globalisasi, dengan segala dampaknya terhadap perdagangan internasional, teknologi, dan arus modal, telah mengubah struktur ekonomi global. Negara-negara yang terbuka terhadap perdagangan bebas dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat melalui investasi asing dan peningkatan akses pasar. Namun, globalisasi juga memperburuk ketimpangan ekonomi baik antar negara maupun di dalam negara itu sendiri. Di satu sisi, negara maju sering mendapatkan manfaat terbesar dari globalisasi, sementara negara berkembang seringkali terjebak dalam ketergantungan terhadap sektor primer dan mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi atau pasar global (Sunarti 2017).²³ Hal ini memperburuk ketidakadilan global, dan menantang politik ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang mampu menanggulangi ketidaksetaraan yang timbul akibat pengaruh globalisasi.

Krisis ekonomi, baik yang bersifat lokal maupun global, juga menjadi tantangan yang signifikan dalam sistem ekonomi dan politik ekonomi. Krisis ekonomi, seperti yang terjadi pada krisis finansial global 2008 atau resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19, menunjukkan bagaimana ketidakstabilan pasar dan kesalahan dalam kebijakan ekonomi dapat memengaruhi sistem ekonomi secara keseluruhan (Alfiyati, Laila, and Amalia 2024).²⁴ Dalam menghadapi krisis tersebut, solusi politik sering kali melibatkan kebijakan fiskal yang ekspansif, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah untuk merangsang permintaan agregat, serta kebijakan moneter yang longgar dengan menurunkan suku bunga untuk mempermudah akses kredit. Namun, krisis ekonomi juga memunculkan tantangan dalam hal keberlanjutan utang, pengangguran massal, dan tekanan sosial yang dapat mengarah pada ketidakstabilan politik. Untuk itu, kebijakan politik yang responsif, transparan, dan berfokus pada pembangunan jangka panjang sangat diperlukan untuk mengatasi dampak krisis dan memastikan pemulihan ekonomi yang inklusif.

Secara keseluruhan, tantangan dalam sistem ekonomi dan politik ekonomi sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah serta aktor politik lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan dampak globalisasi, diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan (Badan Kebijakan Fiskal 2024).²⁵ Di sisi lain, krisis ekonomi menunjukkan pentingnya kebijakan politik yang cepat tanggap dan mampu merespons dinamika pasar dengan strategi yang tepat, sehingga menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

²³ Sunarti, Dwi. 2017. "Globalisasi Dan Ketimpangan : Studi Kasus Dari Ekonomi Berkembang." *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7(2): 1–12. <https://jurnal.uniri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/803>.

²⁴ Alfiyati, Mila, Ariska Nur Laila, and Fitri Amalia. 2024. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Ekonomi Global: Studi Kasus Di Indonesia Pasca Covid-19." *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 11(1): 49–56. doi:10.33701/jekp.v11i1.4479.

²⁵ Badan Kebijakan Fiskal. 2024. "Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Fiskal 2025." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia: 2024–26*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/574>.

KESIMPULAN

Sistem ekonomi adalah cara suatu negara atau masyarakat mengatur dan mengelola sumber daya terbatas untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Sistem ini menentukan bagaimana keputusan ekonomi dibuat, siapa yang memproduksi barang dan jasa, serta bagaimana distribusinya dilakukan. Berbagai jenis sistem ekonomi, seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, mengatur hubungan antara peran pemerintah dan pasar dalam perekonomian, masing-masing dengan cara yang berbeda-beda.

Ruang lingkup sistem ekonomi mencakup berbagai aspek penting, seperti alokasi sumber daya, produksi, distribusi, konsumsi, dan pengaturan harga barang dan jasa. Sistem ekonomi juga melibatkan kebijakan yang mengatur sektor-sektor tertentu dalam ekonomi, termasuk regulasi pasar, distribusi pendapatan, dan pengelolaan ekonomi makro, yang semuanya berperan dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial suatu negara. Pengelolaan yang efektif dalam ruang lingkup ini akan berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan ekonomi yang merata.

Politik ekonomi, yang berfokus pada interaksi antara kebijakan politik dan sistem ekonomi, memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana ekonomi berfungsi. Kebijakan politik yang diambil pemerintah, seperti kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan, akan mempengaruhi struktur dan dinamika sistem ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara sistem ekonomi dan politik ekonomi sangat penting dalam merancang kebijakan yang dapat memajukan perekonomian dan menciptakan pemerataan kesejahteraan.

REFERENSI

- Adiwilaga, Rendy, Prasta Kusumah, and Mustabsyrotul Ummah Mustofa. 2023. "IMPLIKASI RIVALITAS AMERIKA SERIKAT – REPUBLIK RAKYAT CHINA TERHADAP POSISI KEDAULATAN INDONESIA (Studi Kasus Pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan)." *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 2(1): 29. doi:10.24198/aliansi.v2i1.44641.
- Alfiyati, Mila, Ariska Nur Laila, and Fitri Amalia. 2024. "Peran Kebijakan Fiskal Dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Ekonomi Global: Studi Kasus Di Indonesia Pasca Covid-19." *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)* 11(1): 49–56. doi:10.33701/jekp.v11i1.4479.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2024. "Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Kebijakan Fiskal 2025." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia: 2024–26*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/574>.
- Dan, Kemiskinan, and Kesenjangan Sosial. "71-Article Text-296-1-10-20200830." 2(2): 119–28.
- Di, Berbelanja, and Home Smart. 2016. "Ramayanti & Safri 2016 (Dalam Kotler, 2007)." 3(1).
- Eka Rahayu, Annisa, and Mohamad Anton Athoillah. 2022. "Peran Pasar Dalam Distribusi Sumber Daya Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Iqtisaduna* 8(2): 228–39. doi:10.24252/iqtisaduna.v8i2.33291.
- Putri, Fitria, Mifta Amalia, Dewi Aminah Lestari, and Esavira Yunitasya. 2022. "Analisis Peningkatan Sinergi Antara Pasar Tradisional Dan Modernitas Guna Mencapai Penyeluruhan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 22(2): 150–57. doi:10.30596/ekonomikawan.v22i2.12395.
- Hadi, Nur. 2018. "Paradigma Idiologi Sistem Ekonomi Dunia." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17(1): 97. doi:10.24014/af.v17i1.4769.
- Ihsani, Salim Fauzanul, and M. Fathur Rohman. 2022. "Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, Dan Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi-Qu* 12(1): 1. doi:10.35448/jequ.v12i1.16292.
- Al Insany, Muhammad Alif, and R. Moh. Qudsi Fauzi. 2019. "The Concept of Political Economy in the Perspective of Ibn Khaldun." *Journal of Theoretical and Applied Islamic Economics* 6(1): 154–69.
- Kartika, R. 2024. "Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia Dari Hambatan Dan Upaya Penanggulangannya." ... *Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and ...* 4(1): 158–70. <http://ijebef.esc-id.org/index.php/home/article/view/146%0Ahttp://ijebef.esc-id.org/index.php/home/article/download/146/125>.
- Kurnia, Amanda Dwi. 2024. "Peran Politik Dalam Dinamika Ekonomi: Pengaruh Kebijakan Politik Terhadap Pertumbuhan Dan Stabilitas Ekonomi." 1(5): 222–28.
- Lc., M.EI, Misbahul Munir,. 2011. "Peran Pemerintah Dalam Perekonomian Dalam Perspektif Islam." *Iqtishoduna* 1(3). doi:10.18860/iq.v1i3.206.
- Moonik, Friska Erika, Rine Kaunang, and Tommy Fredy Lolowang. 2020. "Analisis Faktor-

- Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Padi Sawah Di Desa Tumani Kecamatan Maesaan.” *Agri-Sosioekonomi* 16(1): 69. doi:10.35791/agrsosek.16.1.2020.27073.
- Mubyarto. 2004. “Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi.” *Journal of Indonesian Economy and Business* 19(1): 16–26.
- Nur, Mahfuz. 2019. “Produksi Dalam Islam.” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 1(01): 97–119. doi:10.34005/elarbah.v1i01.537.
- Nurullah. 2016. “Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi Indonesia.” *sistem ekonomi dan demokrasi Hikamuna I Edisi* 1(1): 16.
- Pratiwi, Ayu. 2021. “Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik Dalam Pembangunan Di Indonesia.” *Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis* 3(1): 1–14. doi:10.31334/abiwara.v3il.1847.
- Rahardjo, M. Dawam. 2009. “Menuju Sistem Perekonomian Indonesia.” *Unisia* 32(72): 113–28. doi:10.20885/unisia.vol32.iss72.art1.
- Salam, Abdul. 2016. “INTERRELASI ANTARA ETIKA DAN SISTEM EKONOMI (Studi Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun).” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1(2): 31. doi:10.21927/jesi.2011.1(2).31-44.
- Suleman, Nenden Herawaty, Ferdiansyah Parenrengi, and Tirta Kurniawan Oelfa. 2021. “Ekonomi Politik Indonesia Saat Ini, Kebijakan, Penerapan Serta Tanggapan Masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado.” *Al-’Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 1(1): 28. doi:10.30984/ajiel.v1il.1509.
- Sunarti, Dwi. 2017. “Globalisasi Dan Ketimpangan : Studi Kasus Dari Ekonomi Berkembang.” *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7(2): 1–12. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/803>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. 2019. “Produksi.” *Sustainability (Switzerland)* 11(1): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Untuk, Diajukan, Memenuhi Sebagian, Dalam Memperoleh, Gelar Sarjana, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Angela Ratih P, Fakultas Ekonomi, and Universitas Airlangga. 2008. “Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 1990-2005.” 13(2): 27–40.
- Wijayanto, Baskoro, Ekonomi Konvensional, Etika Ekonomi, and Islamic World View. “ISLAMIC WORLD VIEW : PERBANDINGAN.” : 112–25.